

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Instansi



Gambar 2. 1 Logo Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [5]

Sejarah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dimulai sejak 1945 dengan berdirinya Kementerian Pengajaran yang dipimpin Ki Hadjar Dewantara. Pada masa awal, kementerian ini berfokus membangun kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana, serta menambah jumlah pengajar. Memasuki era Demokrasi Liberal (1951–1959), meskipun terjadi tujuh kali pergantian kabinet, lahir UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar hukum formal pertama dalam bidang pendidikan [6]. Pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1966), struktur kementerian berubah dan menghadapi tantangan besar, mulai dari konfrontasi Irian Barat hingga peristiwa G30S/PKI.

Perkembangan pendidikan berlanjut pada era Orde Baru (1966–1998) dengan berbagai kebijakan penting, seperti penataran P4, KKN, pembentukan OSIS, serta penerapan Ejaan yang Disempurnakan. Infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada masa ini. Memasuki era Reformasi (1998–2011), kementerian ini berubah nama menjadi Departemen Pendidikan Nasional, kemudian kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2011. Berbagai kebijakan lahir, di antaranya UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, Ujian Nasional, BOS, sertifikasi guru, dan pendidikan karakter. Pada 2021, bidang riset dan teknologi digabungkan sehingga terbentuk Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim dengan program unggulan “Merdeka Belajar” [7].

Terakhir, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024, struktur kementerian diubah kembali dengan berdirinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dipimpin Abdul Mu'ti sebagai menteri pertama dengan visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” [8].

Di dalam struktur organisasi Kemendikdasmen terdapat beberapa biro yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, salah satunya adalah Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Biro ini merupakan satuan kerja pada Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang dibentuk pertama kali pada tahun 1975 dengan nama Biro Tata Usaha, kemudian pada periode 2001 hingga 2019 berganti menjadi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **2.1.1 Visi Misi**

- Visi

Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan maka visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 adalah: “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

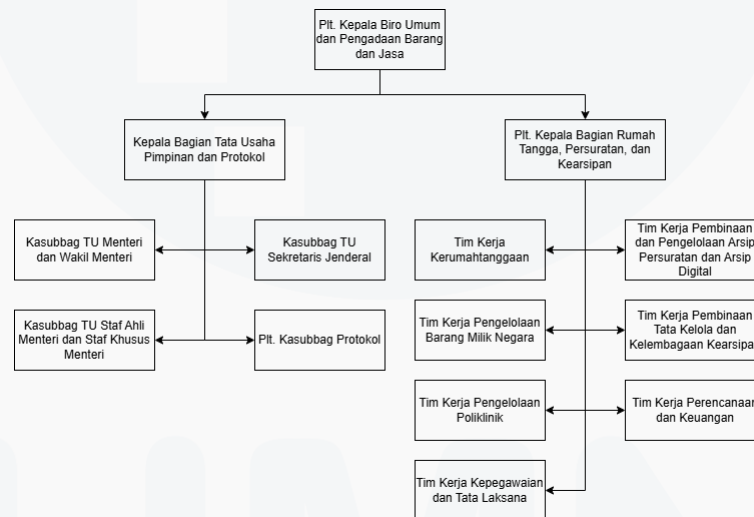
- Misi

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kementerian melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Adapun misi Kementerian:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

## 2.2 Struktur Organisasi Instansi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Pada Gambar 2.2 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dapat dilihat bahwa instansi dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris jenderal. Kepala biro membawahi beberapa bagian yang memiliki fungsi berbeda sesuai bidangnya.

Struktur organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kemendikdasmen terdiri atas beberapa bagian dan tim kerja yang saling berkoordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas biro. Berdasarkan struktur tersebut, penulis melaksanakan kegiatan magang pada Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Laksana, yang berada di bawah naungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Laksana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan, disiplin, serta efektivitas jalannya organisasi. Tim ini tidak hanya mengatur aspek kepegawaian seperti pengelolaan SDM, administrasi pegawai, dan pengembangan kompetensi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tata laksana organisasi berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan tim ini menjadi penghubung antara kebutuhan administratif dan manajerial dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di setiap unit kerja.

Keterkaitannya dengan unit-unit lain dalam struktur organisasi juga sangat erat, karena kelancaran kerja Tim Kepegawaian dan Tata Laksana akan mendukung kinerja tim kerja lain, baik yang bergerak di bidang pengelolaan barang, keuangan, kearsipan, maupun layanan internal. Artinya, tim ini berfungsi sebagai “pondasi” tata kelola birokrasi yang teratur dan sistematis, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.